

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun jika disangkut pautkan dengan nilai dan budaya yang masih mengakar dengan erat di Indonesia, salah satunya yaitu peran dan kedudukan bagi perempuan, maka akan memiliki kesimpulan bahwa semuanya berjalan dengan tidak sesuai apa yang diharapkan. Asumsi yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk kasta kedua di bawah laki-laki adalah asumsi yang berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Penindasan terhadap kaum perempuan mungkin sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, hingga saat ini perempuan di banyak tempat berada dalam posisi termarginalkan. Dan juga banyak dari masyarakat Indonesia khususnya, yang menganut paham patriarki secara sadar ataupun tidak sadar. Banyak yang menganggap perempuan hanyalah memiliki dunia domestik, dan menjadi hal yang tidak lumrah jika perempuan berada di publik dan mengambil atau menggantikan posisi laki-laki. Tetapi ketika berbicara masalah budaya maka akan melekat tentang struktur masyarakat, dimana budaya adalah hasil konstruksi sosial yang tidak akan mudah dipisahkan dari setiap lapisan masyarakat dan yang mana budaya adalah bentuk nyata dari masyarakat tersebut.

Namun pandangan tentang perempuan adalah makhluk dengan kasta nomer dua setelah laki-laki tersebut di atas dapat dirubah seiring berjalannya waktu dan zaman. Apalagi dengan zaman yang sudah sangat modern seperti saat ini, bukan suatu hal yang tidak biasa lagi jika banyak perempuan-perempuan yang menduduki dunia publik dan keluar dari dunia domestiknya. Hal itu dapat terlihat melalui keterlibatan perempuan itu sendiri dalam ikatan kesatuan pada kelompok-kelompok sosial yang diikutinya dalam kehidupan masyarakat, antara lain dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya,

dalam kelompok-kelompok sosial tersebut pada dasarnya memperlihatkan tentang bagaimana peran dan status perempuan itu, bagaimana ketergantungannya dengan individu-individu lain beserta unsur-unsur sosial yang tergabung didalam kelompok tersebut, yang terintegrasi, bersifat lebih kekal dan stabil. Kondisi masyarakat seperti inilah yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sistem sosial.

Dengan berbagai kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan dengan adil tanpa ada satu pihak yang merasa terbelakang, maka banyak bermunculan suatu gerakan perubahan untuk menghidupkan tatanan masyarakat yang menuju pada pembangunan bangsa, dimana banyak di temui gerakan-gerakan dengan subjek perempuan yang bertujuan untuk membuat perempuan-perempuan Indonesia lebih mandiri dan hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa ketimpangan kedudukan dengan laki-laki, juga laki-laki memiliki kehidupan tanpa justifikasi dirinya sebagai pelaku ketimpangan kedudukan tersebut.

Gerakan-gerakan perempuan di ranah masyarakat banyak sekali, baik yang merupakan organisasi pemerintahan sampai organisasi mandiri yang hadir atas dasar latar belakang yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mana organisasi tersebut bergerak dalam bidang pemberdayaan dengan subjeknya adalah keluarga yang pelaku pemberdayaannya itu di dominasi oleh perempuan. Juga didukung oleh banyaknya kegiatan pemberdayaan khusus perempuan dalam organisasi PKK ini.

PKK sendiri merupakan akronim dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, namun dalam sejarahnya sebelum menjadi organisasi pemberdayaan, PKK mengalami beberapa kali perubahan nama seiring berjalannya waktu. Gagasan tentang PKK muncul pada tahun 1961 yang pada tahun tersebut masih bernama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang lahir dari sebuah seminar yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1951. Namun pada saat itu, pendidikan tidak sertamerta dinikmati oleh masyarakat, dan barulah pada tahun 1967 atas keprihatinan Ibu Isriati Moenadi yaitu istri Gubernur Jawa Tengah pada saat itu terhadap masyarakat yang mengalami busung lapar, beliau menuturkan bahwa

“apa yang terjadi pada masyarakat, merupakan bukti bahwa masyarakat pada umumnya belum mencapai taraf sejahtera”. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan bergizi dan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Keawaman masyarakat tentang membangun kesejahteraan dalam keluarga menjadi pengantar masyarakat menemukan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di dalamnya, mulai dari permasalahan pendidikan, ekonomi hingga kesehatan. Berangkat dari hal tersebut ibu Isriati berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan membentuk sebuah gerakan, dimana gerakan tersebut dilakukan dengan sukarela dengan melibatkan banyak dari ibu-ibu pejabat yang notabene mereka telah banyak merasakan kesejahteraan dalam rumah tangga, maka didirikanlah gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga”

Lalu pada tahun 1972, PKK yang tadinya berbunyi “Pendidikan diganti dengan nama “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”. Juga setelah saat itu pula gerakan PKK dilaksanakan tidak hanya di pulau Jawa saja, khususnya Jawa Tengah, tapi merambah hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Seluruh kader PKK memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2000 di Bandung yang dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, adalah pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** yang disingkat **PKK**, dan adanya badan penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK di semua tingkatan. Hasil kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). (Kurnia, Rohmat, 2019, hal. 2-3).

Pada umumnya, di dalam sebuah rumah tangga, suami-lah yang berperan sebagai pencari dan pemberi nafkah. Sedangkan, seorang istri bertugas menjaga

anak-anak mereka dan stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki peranan penting dalam kesejahteraan keluarga dan menjadi inti kemajuan sebuah masyarakat. Oleh karena itu sasaran utama dari pembentukan PKK adalah kaum perempuan dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Dengan memberdayakan dan memajukan perempuan, diharapkan kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Negara, hal ini Indonesia (Kurnia, Rohmat, 2019, hal. 2).

Gerakan PKK ini juga merupakan gerakan tingkat nasional dalam membangun dan pembangunan masyarakat melalui lingkup terkecil dalam bermasyarakat yaitu keluarga. Bahwasanya pembangunan itu merupakan urusan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, yang mana hal tersebut bukan hanya urusan pemerintah, bahkan siapa saja yang merasa dirinya mampu dan memiliki hak, baik itu laki-laki maupun perempuan wajib ikut serta dalam pembangunan tersebut (Notopuro, 1984, hal. 26).

Oleh karena itu perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam dalam setiap aspek pembangunan. Juga telah dijelaskan dan Firman Allah SWT yaitu dalam QS. Al-Hujurat: 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (Ashshiddiqi, et al., 1971, hal. 847).

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak juga kewajiban yang sama, tidak ada yang membedakan diantara keduanya apalagi dibedakan menurut jenis kelamin. Diantara laki-laki dan

perempuan pula memiliki masing-masingnya dapat mengambil peran yang sama dalam hal pembangunan, tidak adak batasan siapapun untuk dapat ikut andil dalam setiap pembangunan. Karena di hadapan Allah SWT yang paling mulia hanyalah mereka yang paling bertaqwa bukan karena dia laki-laki ataupun bukan kerena dia sebagai perempuan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan dalam bentuk organisasi pemerintahan yang berada di tatanan pemerintahan desa dengan cara memberdayakan lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga, karena jika keluarga-keluarga di Indonesia ini berdaya maka Indonesia pun akan berdaya pula. Kehadiran PKK merupakan mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mensejahterakan setiap keluarga Indonesia. PKK berperan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak segala upaya menuju ke kesejahteraan berdasarkan cakupan setiap jenjangnya. Oleh karena itu, mereka yang termasuk sebagai kader atau tim penggerak PKK dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk menunjang seluruh kegiatan PKK.

Dengan demikian, dilihat dari tujuannya, sebagai organisasi mitra pemerintah, gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam upaya mensejahterakan dan membangun masyarakat Indonesia melalui kesepuluh program pokoknya. Gerakan tersebut dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas dengan menyesuaikan setiap jenjangnya (Kurnia, Rohmat, 2019, hal. 6).

Dengan mengangkat kaum perempuan sebagai pelaku dalam PKK, memberikan banyak peluang pengentasan asumsi bahwa perempuan adalah pribadi yang berketergantungan dengan laki-laki atau suami. Dengan banyaknya program PKK yang menekankan pada pembentukan karakter mandiri bagi perempuan, membuat PKK dipercaya menjadi organisasi yang bekerja di bidang pemberdayaan permuan. PKK di banyak tempat menjadi salah satu organisasi yang penting dan harus ada di setiap tatanan pemerintahan desa, karena mengingat PKK merupakan organisasi pemerintah yang banyak menggaungkan pemberdayaan pada ranah keluarga.

Organisasi PKK Kelurahan Sunyaragi yang terkenal aktif dan selalu mendapatkan tropi-tropi kejuaraan di banyak penilaian dan perlombaan seperti Posyandu Remaja yang digerakan oleh kader PKK Kelurahan Sunyaragi yang menjadi juara kedua Piala Wali Kota, menjadi Kota Madya dan Kampung Siaga dalam Piala Wali Kota, maka hal membuktikan bahwa PKK Kelurahan Sunyaragi dapat bergerak secara maksimal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi ini tentunya adalah program pemberdayaan masyarakat yang terkhusus pada perempuan dan umumnya untuk laki-laki ataupun perempuan dalam kehidupan keluarga, baik ekonomi, keterampilan dan keberdayaan lainnya. diantara kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh PKK Kelurahan Sunyaragi adalah berbagai pembelajaran pembuatan keterampilan tangan baik dari seni visual maupun terapan, seperti pembuatan hiasan bunga-bunga dari barang bekas, pembuatan hiasan meja dari kain flanel, pembuatan hantaran untuk pernikahan, karpet atau tas dari plastik bekas bungkus kopi dan lain-lain yang mana hal tersebut dapat memiliki daya jual tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian setiap individunya. hasil kerajinan-kerajinan tersebut dipasarkan kepada penduduk sekitar dan disalurkan ke toko-toko kerajinan seperti Rumah Keluarga yang ada di Kelurahan Sunyaragi tersebut. Lalu kerajinan-kerajinan lainnya dipamerkan ketika ada kegiatan-kegiatan di kelurahan seperti dalam kegiatan bazar, dan hal tersebut menjadi salah satu jembatan mengenalkan karya-karya lokal kepada masyarakat Kelurahan Sunyaragi.

Pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK merupakan salah satu bentuk pembangunan masyarakat dari hal yang kecil, juga kegiatan PKK yang menjadi kaki tangan pemerintah untuk memberdayakan keluarga menjadi suatu hal yang patut banyak diacungi jempol. Dalam hal ini organisasi PKK yang ada di Kelurahan Sunyaragi telah semaksimal mungkin melaksanakan kewajibannya sebagai kader dalam memberdayakan perempuan dan keluarga-keluarga yang ada di Kelurahan Sunyaragi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas serta melihat dari data-data observasi dan wawancara, peneliti menganalisa bahwa

Organisasi PKK memiliki banyak potensi dalam bidang pemberdayaan terkhusus pada pemberdayaan perempuan. Oleh karenanya, menarik perhatian peneliti untuk meneliti secara ilmiah mengenai peran PKK dalam pemberdayaan perempuan secara spesifik di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga dalam skripsi ini peneliti menetapkan judul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI PKK KELURAHAN SUNYARAGI KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan diatas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKK Kelurahan Sunyaragi memiliki banyak program dalam bidang pemberdayaan perempuan.
- b. PKK Kelurahan Sunyaragi memiliki prestasi yang baik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi PKK tersebut.
- c. Banyaknya masyarakat yang masih tertarik dalam kegiatan pemberdayaan di ranah organisasi pemerintahan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah dan menghindari perluasan pembahasan, maka penulis membatasi masalah tersebut yaitu :

- a. Proses kegiatan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- b. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan oleh organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan perempuan oleh organisasi PKK di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan atau sebagai sumber referensi bagi para pendidik, serta mejadi acuan bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru dalam pembelajaran di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
2. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenisnya dan bahan perbandingan bagi pemberdayaan perempuan khususnya melalui PKK.

- 2) Bagi PKK dan Pemerintah Desa di Kelurahan Sunyaragi, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk menggambarkan sumberdaya perempuan yang dimiliki di Kelurahan Sunyaragi agar dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menunjang pembangunan masyarakat.
- 3) Bagi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon : Diharapkan dapat menambah sumber referensi kajian akademik juga sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.
- 4) Bagi penulis : Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya menambah pengetahuan penulis mengenai pengembangan ekonomi ma



